

MENGIKIS SEGREGASI SASTRA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA

Erasing The Segregation of Descent Indonesian Literature of Tionghoa

Suyadi

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Jalan Jenderal Gatot Subroto 10, Jakarta, Indonesia

suya014@brin.go.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan agar tidak lagi terjadi marginalisasi sastra Indonesia terhadap pengarang keturunan Tionghoa. Peminggiran (segregasi) kalangan Tionghoa bukan saja berada di kawasan permukiman, tetapi juga dalam peta sejarah sastra Indonesia. Penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan sejarah. Dari studi pustaka dan analisis deskriptif diketahui bahwa marginalisasi terhadap karya-karya sastra Indonesia keturunan Tionghoa ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor historis, faktor sosiologis, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor estetik. Penelitian ini menyimpulkan agar sastra Indonesia-Tionghoa ini dimasukkan dalam buku-buku sejarah sastra Indonesia serta penulisnya diberikan tempat dan ruang dalam khazanah budaya Indonesia yang pluralis, berdampingan dengan etnis lain. Ibarat sebuah taman, Indonesia akan indah kalau di dalamnya tumbuh beraneka bunga nan bermekaran. Karena itu, artikel ini juga merekomendasikan agar sastra Indonesia-Tionghoa ini dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah tingkat menengah dan perguruan tinggi.

Kata kunci: segregasi, sastra Indonesia, keturunan Tionghoa, sejarah sastra, analisis kritis

Abstract

This article aims to prevent the marginalization of Indonesian literature towards authors of Tionghoa descent. The marginalization (segregation) of Tionghoa circles is not only in residential areas, but also on the map of Indonesian literary history. This qualitative descriptive research was carried out using a historical approach. From literature studies and descriptive analysis it is known that the marginalization of Indonesian literary works of Tionghoa descent is determined by five factors, namely historical factors, sociological factors, political factors, economic factors and aesthetic factors. This research concludes that Indonesian-Tionghoa literature should be included in books on the history of Indonesian literature and that its authors should be given a place and space in the pluralistic Indonesian cultural treasures, side by side with other ethnicities. Like a garden, Indonesia will be beautiful if various flowers grow in it and bloom. Therefore, this article also recommends that Indonesian-Tionghoa literature be included in the educational curriculum in secondary schools and universities.

Keywords: segregation, Indonesian literature, Tionghoa descent, literary history, critical analysis

Informasi Artikel

Naskah Diterima 13 November 2023	Naskah Direvisi Akhir 2 Juni 2024	Naskah Disetujui 22 Juni 2024
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Cara Mengutip

Suyadi.(2024). Mengikis Segregasi Sastra Indonesia Keturunan Tionghoa. *Aksara*. 36(1). 124—137. [doi: http://dx.doi.org/10.29255/aksara.v36i1.4180](https://doi.org/10.29255/aksara.v36i1.4180)

PENDAHULUAN

Sejarah sastra Indonesia wajib diluruskan. Jika hal ini tidak diluruskan, berarti kita mengamini pengingkaran terhadap sejarah. Pengingkaran terhadap sejarah sastra, berarti pengingkaran terhadap kebudayaan Indonesia. Bahtiar dkk (2021) menyatakan bahwa

permasalahan penting dalam penulisan sejarah sastra Indonesia modern adalah menentukan masa awal sastra Indonesia lahir.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Suyadi (2017) bahwa ahli sastra terdahulu kadung merumuskan sejarah sastra Indonesia yang keliru. Ada kekurangtelitian dalam pengumpulan data serta sikap dan periodisasi Sejarah Sastra Indonesia (modern). Mereka tidak memasukkan pengarang Indonesia keturunan Tionghoa dan karyanya dalam penulisan periodisasi tersebut. Padahal, para pengarang tersebut produktif dan signifikan dalam perkembangan sastra Indonesia (modern).

Keberadaan para penulis Indonesia keturunan Tionghoa sesungguhnya bisa menjadi alternatif jawaban pertanyaan Ajip Rosidi, “Kapankah Kesusasteraan Indonesia Lahir?” (1964). Pertanyaan itu juga dimasalahkan lagi dalam "Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia" (1967). Jawaban pertanyaan tersebut tidak jauh beda dengan pendapat ahli-ahli sastra lainnya.

Buku “Pengantar Sejarah Sastra Indonesia” (2007) dan "Pengkajian Kritik Sastra Indonesia" (2009) Yudiono KS juga sempat menaruh harapan untuk membongkar sejarah sastra Indonesia. Apalagi, dia memasukkan data peta sastra Indonesia teranyar, yaitu Temu Sastra Indonesia (TSI) 1 tahun 2008 di Jambi. Dia juga memasalahkan adanya ketidakterbacaan pada sejarah sastra Indonesia. Sayangnya, ia tidak tegas menolak konsep sejarah sastra Indonesia yang ada.

Apa sesungguhnya sejarah? Faisal menyebutkan bahwa sejarah adalah rekaman prestasi manusia. Sejarah bukan semata-mata daftar rentetan peristiwa secara kronologis, melainkan gambaran mengenai berbagai hubungan yang benar-benar manunggal antara manusia, peristiwa, waktu, dan tempat. Manusia menggunakan sejarah untuk memahami masa lampau, dan mencoba memahami masa kini atas dasar peristiwa atau perkembangan-perkembangan di masa lampau.

Analisis sejarah, sebut Faisal, bisa ditujukan kepada individu, gagasan, pergerakan, atau suatu institusi. Meskipun demikian, obyek-obyek observasi sejarah tidak dapat dipandang secara terpisah atau secara sepotong-sepotong. Tidak ada orang yang dapat dijadikan subyek penelitian sejarah tanpa diperhitungkan juga interaksinya dengan gagasan-gagasan, gerakan-gerakan, institusi-institusi yang hidup pada zamannya. Fokus atas salah satu aspek sejarah, hanyalah pembatasan titik penekanan yang menjadi arah telaah para peneliti.

Di dalam ilmu sejarah, peristiwa sejarah sering dicakup dalam istilah fakta sejarah. Dalam hal ini, fakta sejarah memiliki dua arti. Pertama, peristiwa sejarah sebagai suatu perbuatan, aksi, tindakan, dan peristiwa. Kedua, peristiwa sejarah sebagai suatu kebenaran khusus (Kuntowijoyo, 1987 dalam Murtini, 2019). Taufik Abdullah (1987) dalam Walim (2019: 12) mengatakan bahwa sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Rekonstruksi imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses sejarah disebut historiografi. Pada langkah ini, penulis menggunakan analisis kritis historiografi dari butir-butir Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kalau para ahli dan kritikus sastra kita sepakat Sumpah Pemuda merupakan dasar semangat berbangsa dan bernegara, seharusnya tidak hanya butir ketiga yang menjadi landasan sejarah sastra Indonesia.

Klaim selama ini yaitu "Sastra Indonesia adalah sastra yang menggunakan bahasa Indonesia". Padahal, tiga butir Sumpah Pemuda adalah satu ruh, satu jiwa dan raga, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sumpah pertama para pemuda Indonesia tahun 1928 yaitu “bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia”, berarti, siapapun yang lahir dari bumi Indonesia adalah warga Indonesia.

Tumpah darah dalam kosakata ini adalah kelahiran atau bertalian darah. Secara yuridis, berdasarkan pasal 26 ayat (1) UUD 1945, istilah warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua

golongan: pertama, warga negara asli (pribumi), yaitu penduduk asli negara tersebut. Misalkan suku Jawa, suku Madura, suku Dayak, dan etnis keturunan yang sejak kelahirannya menjadi warga negara Indonesia (WNI), merupakan warga negara asli Indonesia.

Dan kedua, warga negara asing (*vreemdeling*), misalnya, bangsa Tionghoa, Timur Tengah, India, Arab, dan sebagainya, yang telah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi warga negara Indonesia. Pernyataan ini ditetapkan kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (UU Kewarganegaraan) bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.

Dengan demikian, secara genealogis, orang-orang yang memiliki pertalian darah dengan orang Indonesia adalah orang Indonesia. Maka, wajar saja jika Irfan Bachdim, Diego Michel, Tamara Blizinsky, meski lahir di negara lain namun memiliki jalinan darah orang Indonesia, berhak mendapat kewarganegaraan Indonesia karena dia memang orang Indonesia.

Sumpah kedua para pemuda Indonesia 1928 yaitu “berbangsa yang satu, bangsa Indonesia”, berarti, siapapun yang tinggal secara resmi di bumi Indonesia adalah warga Indonesia. Secara geografis, orang Indonesia adalah yang berpenghuni dan bertempat tinggal di bumi Indonesia. Bangsa Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dan dari Talaud sampai Rote memiliki beragam suku bangsa. Bangsa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya.

Berdasarkan butir kedua Sumpah Pemuda 1928 ini, maka siapapun yang nenek moyangnya berabad-abad tinggal di bumi Indonesia atau orang asing yang berikrar untuk menjadi orang Indonesia adalah orang Indonesia. Maka, wajar kalau Douwes Dekker, Christian Gonzales, Barack Obama merasa sebagai orang Indonesia.

Sumpah ketiga pada pemuda Indonesia yaitu “menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”, berarti, siapapun yang menjunjung bahasa persatuan atau bahasa Indonesia adalah orang Indonesia. Sumpah ketiga ini bukan berarti menafikan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Indonesia yang terdiri atas ratusan suku bangsa tentu saja memiliki ratusan bahasa suku atau bahasa daerah.

Untuk menjalin persatuan dan kesatuan sesama bangsa Indonesia, maka bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa pemersatu dan bahkan dihormati dan dijunjung. Dari bunyi Sumpah Pemuda itu, sastra Indonesia sudah ada jauh hari sebelum orang Eropa datang ke Indonesia. Kalau mereka (ahli dan kritikus sastra Indonesia) bersepakat bahwa sastra merupakan bagian dari suatu sistem peradaban, maka sastra Indonesia sudah ada sejak manusia Indonesia mengalami peradaban.

Peradaban maju manusia Indonesia bisa dilihat dari hasil kebudayaannya, termasuk sumbangan karya sastra yang ditulis orang Indonesia peranakan atau keturunan Tionghoa. Masalahnya, posisi sastra Indonesia yang ditulis warga keturunan Tionghoa kerap nyaris terpinggirkan. Bagaimanakah segregasi sastra Indonesia keturunan Tionghoa? Apakah segregasi sastra Indonesia keturunan Tionghoa membawa dampak buruk bagi warga Tionghoa itu?

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sejarah. Gottschalk (1986: 32) mengemukakan, metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman peninggalan masa lampau. Menurut Ali (1980: 111), pelaksanaan penelitian dengan metode sejarah dilakukan dengan meninjau suatu masalah dari perspektif sejarah, berdasarkan pada peninggalan atau dokumen sejarah yang ada. Sjamsuddin (2020:62) menyebutkan “sumber dari sejarah yang merupakan data yang digunakan dalam penelitian dengan metode sejarah

diklasifikasikan antara lain remain, dokumen, sumber primer, sumber sekunder, materi fisik, materi tulisan, dan sebagainya”.

Melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Pendekatan kesejarahan ini sangat dibutuhkan dalam memahami sejarah sastra Indonesia, terutama sastra Indonesia keturunan Tionghoa pra-kemerdekaan Indonesia, karena berada dalam situasi yang konkret bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan.

Suryabrata mengatakan, tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, serta menyintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Berkaitan itu, sumber data tulisan ini adalah buku-buku tentang sastra Indonesia yang ditulis pengarang keturunan Tionghoa. Teknik penelitian yang digunakan yaitu studi literatur. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber berupa buku dan media daring (dalam jaringan) berbasis internet yang relevan dengan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal-Usul Istilah Tionghoa dan Segregasinya

Tidaklah dapat dinafikan bahwa sampai akhir abad ke-19, istilah baku yang digunakan oleh dunia Melayu atau mereka yang berbahasa Melayu untuk merujuk kepada Tiongkok dan orang Tionghoa di Indonesia, adalah Cina (*Tjina* atau *China*). Dalam barang-barang cetakan, istilah tersebut sudah dipakai sejak abad ke-17 (Suryadinata, 2002: 101). Pada waktu itu, kata ini tidak dianggap sebagai istilah yang menghina dan tidak seorang pun yang mengusulkan agar istilah Cina diganti dengan Tionghoa.

Suryadinata selanjutnya mengatakan bahwa popularitas istilah Tionghoa (lafal Hokkian, *Zhonghua* dalam bahasa Mandarin baku) di Tiongkok, berhubungan dengan bangkitnya nasionalisme pada akhir abad ke-19. *Zhonghua* digunakan beberapa abad sebelumnya, sebagai sinonim *Zhongguo* (Tiongkok dalam lafal Hokkian) untuk menyebut darat pusat Tiongkok. Istilah *Zhongguo* bermakna “Negeri Tengah” atau “The Middle Kingdom”.

Nasionalis Tionghoa pada zaman modern mengambil istilah ini untuk menyebut negara kebangsaan dan bangsa yang baru. Istilah Tionghoa menjadi nama sebutan resmi dari negara baru: *Zhonghua Minguo* (atau *Chung-hua Min-kuo* dalam ejaan Wade-Giles). Dalam bahasa Inggris, negara itu dikenal sebagai Republic of China.

Penggunaan istilah Tionghoa pertama kali di Indonesia ditemui dalam nama perkumpulan yang didirikan pada tahun 1900, yaitu *Tiong Hoa Hwee* (THHK, *Zhonghua Huiguan* dalam bahasa Mandarin baku). Menurut Suryadinata, sebenarnya istilah “Cina” (*Tjina*) masih digunakan dalam anggaran dasar THHK; Tionghoa masih belum masuk dalam perbendaharaan kata Melayu.

Laporan Komisi THHK pada bulan Desember 1902 yang disiarkan pada tanggal 14 Februari 1903 di surat kabar *Li Po* menggunakan bangsa *Tjina* dan negeri *Tjina* untuk menyebut orang Tionghoa dan Tiongkok. Dokumen THHK lain, yang diterbitkan pada tahun 1904, masih menggunakan nama *Sekolah Tjina* dan *Soerat Tjina* untuk menyebut sekolah dan aksara Tionghoa. Namun istilah bangsa 'Tiong Hoa' juga mulai dipakai.

Istilah Tionghoa, dan kemudian, Tiongkok di kalangan orang Tionghoa di Indonesia, mulai populer dengan bangkitnya nasionalisme Tionghoa di Jawa sebagaimana petikan sajak di awal tulisan ini. Kebangkitan nasionalisme di kalangan orang Tionghoa ada hubungannya dengan penggunaan istilah *Zhonghua* (Tionghoa) di daratan Tiongkok. Orang Tionghoa di Indonesia abad ke-19 dipengaruhi oleh nasionalisme Tionghoa, juga menggunakan istilah tersebut untuk menyatakan solidaritas mereka. Mereka merasa istilah yang berbau Tionghoa itu perlu diperkenalkan dalam bahasa Melayu, bahasa yang digunakan peranakan Tionghoa sehari-hari.

Tan (1979: via Pelly dalam Hadiluwih, 1994: iv) menyebutkan, orang Tionghoa di Asia Tenggara merupakan kelompok minoritas yang penting dan bergengsi. Kedudukan strategis mereka di tengah masyarakat disebabkan posisi yang sangat sentral di bidang industri dan perdagangan. Kedudukan ini telah mereka raih sejak migrasi ke negara-negara Asia pada penghujung abad ke-5.

Sejak kurun itu, terdapat kesinambungan dominasi di bidang okupasi dengan pengembangan jaringan komunikasi dagang di dalam dan di luar negara di tempat mereka bermukim. Jaringan komunikasi dagang ini diperkuat dengan pelibatan sistem kekerabatan (*kinship*) yang memungkinkan "transfer" kecakapan dan rahasia dagang dapat dimonopoli berketurunan.

Dari sudut pandang ini, orang cenderung untuk menganggap bahwa orang Tionghoa perantauan tidak melakukan dan atau telah menghindari proses asimilasi dengan penduduk negeri setempat. Justru pula, menurut Mallory (1956, *ibid*), di Asia Tenggara dan di belahan bumi lainnya banyak orang Tionghoa perantauan mempunyai kecenderungan untuk hidup dalam komunitas yang segregatif (menyendiri dan terpisah) dalam area pemukiman (*settlement*) yang tersendiri.

Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa permukiman eksklusif kelompok-kelompok etnik di kota-kota seperti berfungsi "kepompong" (kapsul-kapsul) yang dimanfaatkan oleh mereka sebagai benteng etnis (Pelly, 1983, *lokcit*). Orang Tionghoa yang keluar dari pemukiman Cina (*Chinese Quarter*) tersebut dapat dianggap sebagai pembelotan dari jaringan sosial mereka. Suasana etnik dan ras (*ethnic race-spaces*) di perkampungan etnik tersebut menguatkan kecenderungan segregasi (pemisah diri) dari kelompok lain.

Dalam suasana segregasi pemukiman maka betapa sukarnya untuk menjalin komunikasi dan interaksi sosial dengan kelompok-kelompok etnis lainnya di perkotaan terutama dalam kehidupan bersemuka (*face-to-face*). Malah, karena pola permukiman segregatif itu pula menimbulkan kesulitan dan hambatan psikologis bagi kelompok Tionghoa untuk mendekati salah satu kelompok etnis masyarakat kota lainnya guna dijadikan panutan (*patron*) dalam proses akulturasi beberapa wilayah di kota-kota di Indonesia, termasuk Medan.

Keterpencilan kaum keturunan Tionghoa itu mengakibatkan pertumbuhan hambatan asimilasi mereka. Hal ini diperparah dengan kemunculan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina (Tionghoa). Dalam peraturan tersebut, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan segenap badan serta alat pemerintah di Pusat dan Daerah untuk melakukan beberapa hal, yakni: 1) Tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadahnya, tata cara ibadah Tionghoa yang memiliki aspek afinitas kultural yang berpusat pada leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan; 2) Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Tionghoa dilakukan secara tidak mencolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga; 3) Penentuan kategori agama dan kepercayaan maupun cara-cara adat agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa diatur oleh Menteri Agama setelah mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung.

Diskriminasi terhadap kewarganegaraan orang Tionghoa ini juga terjadi pada peraturan ganti nama bagi WNI yang menggunakan nama Tionghoa (Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 tahun 1966). Di lingkungan sastrawan, muncul nama-nama, Mira W., Marga T., Abdul Hadi W.M., Arief Budiman, Ariel Heryanto, Eka Budianta, Kurniawan Junaedhie. Mereka adalah warga negara Indonesia peranakan Tionghoa. Penyebab segregasi keturunan Tionghoa juga berkat larangan mengimpor, memperdagangkan, mengedarkan segala barang jenis cetakan dalam huruf, aksara, dan bahasa Tionghoa (SK Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 285 tahun 1978).

Setijowati (2012) melakukan penelitian terhadap dua teks sastra yang ditulis peranakan Cina dan menggambarkan cara bertaha orang Tionghoa di Indonesia. Orang Tionghoa-Indonesia memerlukan fleksibilitas yang tampak pada penggunaan bahasa, genre sastra, dan filosofinya yang terhubung dengan lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal. Pemerintah kolonial Belanda dan Orde Baru memperlakukan mereka juga mendua. Warisan itu sampai sekarang berwujud penggantian nama Tionghoa dengan nama Indonesia agar mendapat identitas WNI.

Segregasi Sastra

Segregasi kalangan Tionghoa terjadi juga dalam peta sejarah sastra Indonesia. Keberadaan sastra Tionghoa nyaris dilupakan begitu saja. Penggunaan bahasa Melayu rendah dijadikan alasan karya sastra ini tidak dianggap sebagai bagian dari hasil kesusastraan Indonesia. Sementara kesusastraan Balai Pustaka yang menggunakan bahasa Melayu tinggi dianggap sebagai bagian kebudayaan bangsa.

Nio Joe Lan (1950: 7, 14 dalam Faruk dkk., 2000: 12) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sastra peranakan Tionghoa adalah karya-karya sastra asli hasil ciptaan kaum peranakan Tionghoa yang menggunakan bahasa "Melayu Rendah" sebagai medianya. Umumnya orang menganggap bahwa sastra peranakan Tionghoa ini ditulis dalam bahasa Melayu-Tionghoa, bukan bahasa Indonesia yang baku (Balai Pustaka), karena itu rendah mutunya. Bahasa Melayu-Tionghoa yang juga dikenal sebagai bahasa "Melayu Rendah" dianggap bahasa kampung, padahal bahasa itu juga dipakai oleh banyak pengarang pribumi dan wartawan pribumi, sekurang-kurangnya sebelum tahun 1930-an.

Pramono (2019) menyatakan bahwa sastra Melayu Tionghoa merupakan sastra yang terlahir di bumi Indonesia namun termarginalkan akibat problem politik. Lan mengemukakan, sastra Indonesia peranakan atau keturunan Tionghoa dalam posisi marginal dari aspek sosiolinguistik (bahasa Melayu Rendah), bacaan liar, roman picisan (sastra populer), tidak diperhitungkan, tidak menjadi bagian dari sastra Indonesia, dan bahkan pengarangnya dianggap orang asing. Padahal, berdasarkan jumlah karyanya, telah terbit sastra Melayu Tionghoa (1870 – 1960) tidak kurang dari 3.005 judul dengan 806 penulis. Jumlah tersebut jauh melampaui jumlah karya sastra dan penulis sastra Indonesia dalam kurun waktu yang sama.

Pada Februari 2002, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia menggelar seminar "Bahasa dan Sastra Melayu Tionghoa". Acara penting ini dihadiri para tokoh tersohor sekaligus sebagai pemakalah, di antaranya, Prof. Harimurti Kridalaksana, Prof. Suripan Sadi Hutomo, Dr. Sapardi Djoko Damono, Drs. Jakob Sumardjo, Dra. Myra Sidharta, Dr. Dede Utomo, Leo Suryadinata, dan lain-lain.

Seminar tersebut menyebutkan bahwa bahasa "Melayu Rendah" dipakai secara luas sehingga semua koran dan buku yang bukan diterbitkan oleh pemerintah dicetak dalam bahasa tersebut. Pramoedya Ananta Toer menyebutnya "Bahasa Kerja", lawan dari bahasa sekolah. Bukanlah secara kebetulan jikalau banyak penulis yang berhaluan nasionalis dan ideologi kiri sebelum dan sesudah berdirinya *Bureau van der Volkslectuur* (Balai Pustaka) menulis bahasa kerja itu. Misalnya, Tirta Adhi Soerjo, Mas Marco, dan Semaoen, semuanya menerbitkan buah karya dalam bahasa tersebut.

Karya-karya itu tidak disenangi oleh penguasa Belanda dan dianggap berbahaya untuk kestabilan masyarakat Karena itu, penguasa Belanda menggunakan satu strategi untuk memencilkan tulisan-tulisan ini. Pemerintah kolonial Belanda pun berhasil mengasingkan bahasa "Melayu Rendah" (Melayu Tionghoa) ini sehingga sejak tahun 1930 kebanyakan pengarang pribumi hanya menulis dalam bahasa "Melayu Tinggi" (Indonesia baku), yaitu yang dipakai di sekolah-sekolah pemerintah. Bahasa itu adalah bahasa Balai Pustaka. Sejak itu, baik sastra

"Melayu Rendah" maupun sastra peranakan Tionghoa menjadi sastra kelas kambing dan juga dianggap bukan bagian dari sastra Indonesia yang baik.

Salmon memperkirakan karya sastra peranakan Tionghoa itu bermula dari tahun 1870, yaitu dengan munculnya sebuah syair pertama berjudul "Sair Kedatangan Sri Maharadja Siam di Betawi". Meskipun tidak dapat diketahui nama pengarang yang sesungguhnya, syair itu tampaknya memang diciptakan oleh peranakan Tionghoa. Hal itu terlihat dari adanya penekanan yang kuat pada peranan yang dimainkan oleh kaum peranakan dalam menyambut kedatangan raja Siam yang diceritakan di dalamnya. Berikut ini petikan sajak "Sair Kedatangan Maharaja Siam di Betawi"

*"Mayoor, kaptein dan leutnan Cina
Samua bangsanya baris di sana
Kaya. Miskin dan Nyang terhina
Hormat yang patut dengan samporna*

*Mayoor Cina nyang kwasa kongkoan
Ia nyang prenta ini bikinan
Orang petak baru dan patekoan
Hendak kerja ini permaenan*

*Jengge liong (naga), kijing-kijingan
Loleng ikan burung-burungan
Damarnya banyak jadi terangan
Dansunya maen Paling belakangan"*
(Marcus dan Benedanto, 2000:14)

Catatan: *Kongkoan* adalah gedung majelis. *Petak baru patekoan* adalah dua daerah di Betawi, tempat tinggal orang Tionghoa, *Jengge* adalah arak-arakan kereta yang mengajak anak-anak yang dirias. *Loleng* berarti lampu. (Suaka, 2022).

"Syair" merupakan bentuk kesusastraan pertama yang digemari kaum peranakan Tionghoa. Hal itu terlihat dari tingginya produksi bentuk sastra tersebut pada fase awal perkembangan sastra peranakan Tionghoa. Menurut Salmon, dari tahun 1886 hingga tahun 1910 ditemukan sebanyak 40 buah syair oleh 27 orang pengarang. Adapun isinya antara lain berupa (1) saduran dari yang sudah ada, (2) cerita mengenai kejadian semasa yang kadang-kadang berbentuk cemoohan, (3) cerita yang bersifat nasihat atau pelajaran, dan (4) karya yang dimaksudkan sebagai hiburan semata.

Saduran dari karya-karya prosa yang sudah ada antara lain terlihat dari *Shair Ong Tjiauw Koen Ho Hoan* (1888) yang didasarkan pada Cina, *Sair tjerita di tempo tahoen 1813 soeda kedjadian di Betawi, terpoengoet jeritanja dari boekoe Nyaie Dasima* yang didasarkan pada novel "Nyai Dasima" karya G. Francis yang terbit pertama kali tahun 1896.

Syair yang didasarkan pada kejadian-kejadian semasa antara lain adalah *Sjair atau pantoen aken djoedoh perak deri bangsawan Ambon*, karya Abdul Karim Tjiat (1865--14 Maart 1890), *Sair dari hal datengnya Poetra Makoeta Keradjaan Roes di Betawi dan pegihnya* karya Tan Teng Kie (1891), dan *Shaer Almarhoem Beginda Sultan Abubakar di Negri Johor* karya Na Tian Piet (1896).

Kegemaran pada syair kemudian tergeser oleh kegemaran terhadap novel. Di dalam sastra peranakan Tionghoa, novel pertama muncul pada tahun 1903, "Boen". Novel ini berisi cerita mengenai petualang yaitu dengan terbitnya "Oey See" karya Thio Tjien seorang totok yang menjadi kaya. Novel berikutnya adalah "Lo Fen Koeil" karya Gouw Peng Liaang yang berisi cerita tentang seorang pemegang monopoli candu dengan berbagai kejahatan yang pernah dilakukannya.

Novel-novel dapat dibedakan menjadi enam genre, yaitu cerita-cerita sejarah, novel-novel mengenai tata cara hidup, novel-novel mengenai dewa-dewa dan setan-setan, novel-novel tentang perjuangan keadilan, dan cerita-cerita pendek berupa satire sosial. Selain itu, terdapat pula khazanah kesusastraan lisan yang dituturkan baik dalam bentuk prosa maupun puisi. Berikut ini petikan novel masterpiece “Boenga Roos dari Tjikembang” karangan sastrawan dan dramawan Kwee Tek Hoay:

“Dikisahkan Oh Ay Tjeng seorang pengurus perkebunan. Dia mempunyai seorang nyai bernama Marsiti. Pada suatu hari ayah Ay Tjeng mendesak anaknya agar menceraikan Marsiti, karena akan dinikahkan dengan anak majikannya. Dalam keadaan terpaksa Ay Tjeng memutuskan hubungan dengan Marsiti dan menikah dengan Liok Gwat Nio.

Ay Tjeng merasa heran karena banyak kemiripan Gwat Nio dengan Marsiti. Beberapa bulan kemudian ayah Gwat Nio sakit parah. Menjelang meninggal, ayahnya membuka rahasia Marsiti kepada Ay Tjeng. Marsiti adalah saudara Gwat Nio yang lahir dari seorang nyai yang kemudian diusir akibat suatu fitnah.

Pernikahan Ay Tjeng dengan Gwat Nio melahirkan seorang anak bernama Lily. Kemudian Lily bertunangan dengan anak pemilik perkebunan Tjikembang yang bernama Sim Bian Koen, tetapi Lily meninggal beberapa hari, menjelang pernikahan mereka.

Bian Koen merasa sedih dan mendaftarkan diri menjadi tentara Cina agar cepat gugur di medan perang. Sehari sebelum berangkat dia berjalan-jalan di perkebunan ayahnya. Di dekat sebuah makam dia merasa melihat roh Lily. Seorang dukun yang dipanggil dan melihat potret Lily, mengenalinya sebagai Roesminah yang tinggal di dekat makam tersebut. Roseminah adalah anak almarhumah Marsiti sebagai hasil hubungannya dengan Ay Tjeng.”

Novel ini sangat menawan hati, sebuah cerita yang sedih. Dalam sebuah episode, mirip alur cerita “Sitti Nurbaya” (Marah Rusli). Novel ini mengalami beberapa kali cetak ulang. Pernah dua kali diangkat ke layar lebar, tahun 1931 dan 1976.

Kwee Tek Hoay adalah sastrawan Indonesia peranakan Tionghoa yang lahir di Bogor pada 13 Juli 1886. Hoay pernah berpolemik dengan *Sin Po*. Menurut Hoay, sastra Indonesia agar berbaur dengan budaya Indonesia, tetapi *Sin Po* tidak setuju dan tetap ingin mempertahankan budaya Tionghoa. Pihak *Sin Po* menganggap keturunan Tionghoa sebagai orang asing di Hindia Belanda (Indonesia) yang harus menggunakan bahasa Hokkian sebagai bahasa pertama. Hoay tidak setuju dan berpandangan lebih moderat, seperti terlihat dalam karyanya “Boenga Roos dari Tjikembang” yang menyesuaikan ceritanya dengan keadaan di Indonesia.

Karena peranakan Tionghoa di Indonesia sudah tidak dapat lagi menggunakan bahasa asalnya sebagaimana dialami Hoay, menurut Salmon sebagaimana dicatat Faruk dkk, karya-karya Tionghoa tradisional dinikmati selain melalui penuturan lisannya, juga melalui terjemahan-terjemahannya ke dalam bahasa setempat.

Isnaini (2022) membahas konsep mistik-romantik pada tragedi bencana meletusnya Gunung Krakatau pada novel "Drama dari Krakatau" karya Kwee Tek Hoay. Novel ini terinspirasi oleh novel Baron Edward Bulwer-Lytton yang berjudul "The Last Day of Pompeii" yang diterbitkan tahun 1834. Mistik-romantik dalam novel ini dimaknai sebagai peristiwa yang digambarkan dalam perspektif sastrawan atas peristiwa bencana yang terjadi melalui kacamata karya sastra. Artikel Isnaini memperlihatkan novel "Drama dari Krakatau" Kwee Tek Hoay sebagai alat dokumentasi tentang peristiwa bencana dengan balutan romansa cerita khas novel Melayu Tionghoa.

Secara kualitatif, tema yang diusung sastra Melayu Tionghoa pun beragam. Salah satu tema yang menarik adalah wanita pribumi (Pramono, 2019). Kajian terhadap wanita pribumi untuk melihat model wanita pribumi yang ditokohkan oleh para pengarang Tionghoa yang umumnya laki-laki. Dalam hal ini, terfokus pada deskripsi sikap, pikiran, peranan wanita pribumi, dan penokohnya.

Hasil kajian Pramono menunjukkan bahwa deskripsi sikap dan pemikiran tokoh wanita pribumi terhadap seluruh tokoh Tionghoa umumnya positif. Namun terhadap tokoh pribumi laki-

laki cenderung negatif karena umumnya laki-laki pribumi umumnya digambarkan sebagai tokoh antagonis. Selain itu, peran wanita pribumi dalam Sastra Melayu Tionghoa adalah sebagai pembantu, gundik, pacar, dan pada sedikit kasus menjadi istri yang sah. Para tokoh wanita pribumi pada Sastra Melayu Tionghoa dinilai cenderung diposisikan secara *unlike life* yang mengejaukan adanya kecenderungan sifat dominasi pemikiran dari para pengarang laki-laki Tionghoa.

Merisa dan Ahmadi (2020) meneliti perjuangan perempuan keturunan Tionghoa di tengah budaya patriarki yang ada di masyarakat dalam antologi cerpen “Yang Liu” karya Lan Fang dengan kajian feminisme eksistensialis Simon De Beauvoir. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya sikap feminisme eksistensialis tokoh utama dalam antologi cerpen tersebut serta bentuk patriarki keluarga dan masyarakat terhadap tokoh utama.

Karya-karya terjemahan dalam bahasa Jawa antara lain adalah *Serat Babad Tong Tya*, *Serat Sam Pek Eng Tae*, *Babad Nagari Cina*, *Babad Sam Kok*, *Ma Tjoen: Tjarjos Nagari Cina*, *Senapati Tik Jing*, dan *Nga Ha Ping Lam*. Di dalam bahasa Melayu ditemukan sebanyak 795 buah karya terjemahan, suatu jumlah yang amat besar dibandingkan dengan jumlah karya-karya terjemahan dalam bahasa-bahasa sebelumnya.

Di bidang kritik, Salmon menyebutkan, sejarah kritik sastra peranakan Tionghoa sulit diteliti sebab terbit dalam harian-harian dan majalah-majalah. Ia menyatakan bahwa kritik sastra itu pertama kali berkembang menjelang tahun 1924--1928. Menurutnya, penilaian kritik sastra peranakan Tionghoa itu berkisar pada tiga masalah pokok, yaitu masalah kebahasaan, masalah estetika kesusastraan, dan masalah biografi pengarang.

Dari segi ideologi kesusastraannya, Faruk dkk. membedakan kritik sastra peranakan Tionghoa menjadi dua macam, yaitu kritik sastra hegemonik dan kritik sastra pembebasan. Kritik sastra hegemonik merupakan kritik sastra yang masih mengikuti ideologi kesusastraan yang dianut oleh sastra Indonesia tradisi Balai Pustaka, yakni yang menempatkan sastra peranakan Tionghoa dalam posisi yang marginal. Kritik ini muncul sejak awal kelahirannya hingga tahun 1960-an. Kritik sastra yang kedua adalah kritik sastra yang sudah berusaha membebaskan diri dari hegemoni ideologi kesusastraan tradisi Balai Pustaka. Kritik ini muncul sejak tahun 1970-an.

Dari uraian di atas, masih terikatnya peranakan Tionghoa pada tradisi kultural dari negeri asal yang dipotret dari karya-karya sastra kreatif dan tradisi kritik secara ideologis kesusastraan, menjadikannya seakan hidup di dalam sebuah kantong budaya yang tersendiri, yang terpisah dari kebudayaan setempat. Akan tetapi, hal itu tidak dengan sendirinya berarti interaksi budaya antara keduanya terabaikan.

Di satu pihak, orang-orang peranakan Tionghoa sesungguhnya ikut menikmati kebudayaan setempat seperti wayang, hikayat, dan syair-syair, di sisi lain penduduk setempat juga mengapresiasi karya-karya sastra Tionghoa seperti yang terbukti dari sangat populernya cerita “Sam Pek Eng Tae” di kalangan mereka, baik dalam masyarakat Jawa, Bali, Madura maupun Medan. Drama *Romeo & Yulia* versi Tiongkok ini sukses dipentaskan Teater Koma di Balai Raya Hotel Tiara Medan (2001).

Begitupun, kepiawaian sastra Indonesia peranakan Tionghoa nyaris tidak diakui sebagai bagian dari sejarah sastra Indonesia. Kesusastraan tersebut cenderung dianggap sebagai kesusastraan pinggiran yang diabaikan. Marginalisasi terhadap karya-karya tersebut ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor historis, sosiologis, politik, ekonomi, dan estetik.

Karena kebijaksanaan politik kolonial Belanda, eksistensi sastra Indonesia keturunan Tionghoa telah diabaikan sama sekali. Walaupun beberapa penulis pribumi seperti Sutan Takdir Alisjahbana dan Armijn Pane menaruh perhatian, tidak ada usaha untuk memperkenalkan sastra ini. Di kalangan peranakan sendiri juga ada yang menulis, misalnya Nio Joe Lan maupun Leo Suryadinata, tetapi juga kurang mendapat tanggapan yang hangat. Barulah setelah Dr. Claudine

Salmon, seorang sarjana Perancis, menerbitkan sebuah buku setebal 500 halaman dan mencantumkan buah karya sastra peranakan Tionghoa yang sebanyak 3.000 judul, dunia telah mulai sadar bahwa sudah waktunya sastra yang dilupakan ini dikaji kembali.

Antitesis

Secara kuantitas, Salmon mendata bahwa sastra Indonesia peranakan Tionghoa melibatkan 806 orang penulis, menghasilkan karya asli, saduran, terjemahan, mencapai 3000 buah. Data Teeuw, sastra Indonesia peranakan Tionghoa terdapat 284 pengarang dan 770 karya sastra. Data ini jauh melebihi produk pengarang angkatan Balai Pustaka (Salmon, 1985).

Secara kualitas, menurut Lan, mutu sastra Indonesia peranakan Tionghoa tidak kalah (sejajar) dengan novel-novel Balai Pustaka, seperti “Sitti Nurbaya” dengan “Allah yang Toelen” (Ong Kit Tat), “Salah Asuhan” dengan “Nona Olanda sebagai Istri Tionghoa” (Njoo Cheong Sheng), “Salah Pilih” dengan “Nona Lam In” (Tan Boen Kim). Kuantitas dan kualitas sastra Indonesia peranakan Tionghoa nyatanya tersisih oleh hegemoni ideologi Kolonial, Orde Lama (dikotomi asing dan pribumi), dan Orde Baru (nuansa SARA).

Menurut Salmon, dari segi linguistik, bahasa Melayu-Tionghoa sesungguhnya tidak ada, karena bahasa itu dipakai oleh kebanyakan pribumi dan nonpribumi pada waktu zamannya. Hanya setelah pemberontakan PKI tahun 1926-1927, bahasa itu baru diberi julukan "Melayu-Tionghoa". Setelah Salmon, banyak sarjana seperti Dede Utomo dan Prof. Harimurti yang menelitinya secara lebih mendalam dan juga mengambil kesimpulan yang tidak berbeda.

Jadi, rupanya telah disetujui bahwa apa yang dinamakan bahasa Melayu-Tionghoa itu sebetulnya adalah ragam bahasa, "Melayu Rendah", bukan sebuah bahasa tersendiri di luar bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam karya sastra peranakan Tionghoa sebetulnya merupakan bahasa yang umum digunakan di surat-surat kabar abad ke-19, yaitu bahasa Melayu lisan, lingua franca yang biasa digunakan keseharian masyarakat.

Namun, bahasa Melayu ragam lisan nonbaku dimarginalkan dengan sebutan bahasa Melayu Rendah. Bahasa Melayu Rendah ini dipertentangkan dengan bahasa Melayu Tinggi yang digunakan oleh karya-karya sastra Balai Pustaka. Kalau yang kemudian ini merupakan bahasa sekolah-sekolah yang terstandardisasi dan bersumber pada bahasa Melayu Istana; bahasa yang pertama itu merupakan bahasa percakapan sehari-hari yang digunakan secara nyata dalam masyarakat, sangat terbuka atas banyak pengaruh dan kurang terstandardisasi.

Ada anggapan, secara tradisional bahasa Melayu Tinggi cenderung lebih pantas untuk menjadi bahasa kesusastraan daripada bahasa Melayu Rendah. Bahasa yang pertama itu memang telah berabad lamanya menjadi media bagi kesusastraan Melayu sehingga bahkan menjadi tidak dapat dipisahkan darinya. Sebaliknya, bahasa Melayu Rendah dianggap bahasa sehari-hari yang tidak layak digunakan sebagai alat ekspresi kesusastraan.

Pendikotomian bahasa Melayu ragam Rendah dan Tinggi sesungguhnya kontradiksi dengan alasan butir ketiga Sumpah Pemuda yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari, karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa (bahasa kasar dan bahasa halus) sebagaimana bahasa Jawa dan Sunda.

Apalagi, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Hal inilah yang membuat suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dalam Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928 dengan suka rela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Sutan Taktir Alisyahbana melalui Suryadinata sudah mengingatkan supaya tidak memperuncing masalah bahasa Melayu Rendah dan bahasa Melayu Tinggi dalam konteks karya imajinatif. Sebab, sastra Indonesia peranakan Tionghoa tumbuh dengan menggunakan bahasa

yang dipakai dari bawah, sedangkan karya-karya sastra terbitan Balai Pustaka menggunakan bahasa yang sudah ditetapkan pemerintah Belanda.

Watson, sebagaimana dikutip Suaka, menilai dari segi bahasa bahwa sastra Indonesia peranakan Tionghoa tidak inferior, melainkan justru menentukan. Keunggulannya, antara lain, bahasanya lebih hidup, lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, lebih berpijak di bumi, dan lebih bebas berekspresi.

Pada abad ke-15 berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu klasik sebagaimana digunakan dalam syair-syair Hamzah Fansuri hingga ke seluruh pelosok negeri. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatra, Borneo, Celebes, Maluku, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Pada akhir abad ke-19 pemerintah kolonial Hindia-Belanda melihat bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi. Pada periode ini mulai terbentuklah “bahasa Indonesia” yang secara perlahan terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau-Johor.

Selanjutnya, pada awal abad ke-20, bahasa Melayu terbagi menjadi dua. Di tahun 1901, Indonesia di bawah Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuijsen sedangkan pada tahun 1904 Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Dengan demikian, keberadaan sastra peranakan Tionghoa tidak dapat dipisahkan dari sejarah sastra Indonesia.

Lan mengusulkan agar terjadi integrasi antara sastra Melayu Tionghoa dengan sastra Indonesia menjadi Sastra Indonesia-Tionghoa dengan alasan bahwa orang-orang peranakan Tionghoa bukanlah orang Tionghoa lagi. Telah menjadi orang Indonesia. Mereka tidak mempunyai hubungan lagi dengan negeri asalnya, dan menganggap Indonesia satu-satunya tanah air mereka.

Orang-orang peranakan Tionghoa di depan penguasa kolonial Belanda, sebut Lan, mempunyai nasib yang sama dengan orang Indonesia. Mereka tidak diperlakukan dengan baik oleh Belanda, seperti dalam bidang pendidikan. Penggunaan bahasa Melayu Rendah dalam sastra Indonesia peranakan Tionghoa pra-kemerdekaan Republik Indonesia karena tidak ada standardisasi dan kesadaran gramatika dalam bahasa, sebagai akibat kurangnya pendidikan.

Pada masa sekarang, segregasi sastra Indonesia peranakan Tionghoa seharusnya sudah tidak ada. Apalagi era reformasi menjunjung hak asasi manusia terutama untuk memeluk dan menjalankan kehidupan beragama bagi warga etnis Tionghoa. Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 tahun 2000 mengenai pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa.

Dalam Diktum menimbang Keppres itu, disebutkan bahwa selama ini pelaksanaan Inpres Nomor 14 tahun 1967 telah membatasi ruang gerak dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat yang pada hakikatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Dengan adanya peraturan baru ini, penyelenggaraan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa dilaksanakan tanpa memerlukan lagi izin khusus sebagaimana berlangsung sebelumnya.

Dengan demikian, sejarah sastra Indonesia sangat perlu untuk diperbarui bahwa bukan dimulai pada era 1900 atau 1920 sebagaimana dikatakan Ajip Rosidi dkk., apalagi sejak Balai Pustaka. Sesuai butir pertama Sumpah Pemuda, siapa pun yang lahir atau bertumpah darah di Indonesia dia adalah orang Indonesia. Maka, Kwee Tek Hoay, Ting Sam Siem, Thijt Liap Seng, Thio Tjien Boen, Gouw Peng Liang adalah sastrawan Indonesia sebagaimana Hamzah Fansuri, Raja Ali Haji, Raden Ngabehi Ronggowarsito, Mas Marco Martodikromo, Raden Mas Tirto Adhisurjo, Sutan Hasoendoetan, Sutan Pangurabaan Pane, dan Williem Iskandar pada masa sebelum Balai Pustaka.

Begitu juga jika menilik butir kedua Sumpah Pemuda, yaitu berbangsa atau bertempat tinggal di bumi Indonesia, maka Multatuli, F. Wiggers, Eddy du Perron, G. Francis, van

Ophuijsen adalah sastrawan Indonesia keturunan Eropa sebagaimana Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dan Nuruddin Ar-Raniri keturunan Timur Tengah.

Jika dikaitkan dengan butir ketiga yaitu “menjunjung tinggi bahasa Indonesia” bukan berarti meminggirkan bahasa-bahasa lainnya di Indonesia. Maka, *Mahabharata, Arjuna Wiwaha, Serat Kalatida, Lutung Kasarung, Wawacan Angling Dharma, Jayaprana dan Layonsari, Calon Arang atau Nyai Dasima, Allah yang Palsu, Bintang Toedjoeh, Syair Perahu, Bhagawat Githa, Syailendra, Gurindam Dua Belas* adalah karya-karya sastra Indonesia yang luar biasa hebat. Karya-karya tersebut menggunakan bahasa Jawa, Sunda, Bali, dan Melayu. Itu, belum lagi karya sastra yang muncul di surat kabar era 1800 hingga awal 1900.

SIMPULAN

Segregasi sastra peranakan Tionghoa di Indonesia seharusnya sudah tidak ada lagi. Hal ini bisa terjadi jika sastra Indonesia-Tionghoa ini dimasukkan dalam buku-buku sejarah sastra Indonesia. Penulis berharap agar sastra Indonesia-Tionghoa diberikan tempat dan ruang dalam khazanah budaya Indonesia yang pluralis, berdampingan dengan etnis lain. Ibarat sebuah taman, Indonesia akan indah kalau di dalamnya tumbuh beraneka bunga nan bermekaran. Karena itu, artikel ini juga merekomendasikan agar sastra Indonesia-Tionghoa ini dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah tingkat menengah dan perguruan tinggi.

Bahasa Melayu Rendah (Melayu Tionghoa) sebenarnya merupakan bentuk modifikasi dari bahasa Melayu pasar atau ragam lisan. Tidak ada pedoman yang pasti dalam pemakaian bahasanya, sebab terdapat berbagai varian dan ketidakkonsistenan di dalamnya. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat bahasa ini pun banyak menyerap kata-kata dan majas dari bahasa lainnya, sehingga menjadi penyumbang perkembangan bahasa Indonesia.***

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, A., Waluyo, H.J., Suwandi, S., & Setiawan, B. (2021). Menyelisik Sastra Melayu Rendah. *Jurnal Alyasastra*. 17(1). <https://doi.org/10.36567/aly.v17i1.543>
- Coppel, C.A. (1994). *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Damono, S.D. dan Budianta, M. (Ed). (2009). *Sandiwara Derma, Antologi Drama*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Damono, S.D. dan Budianta, M. (Ed). (2009). *Meneer Perlente, Antologi Puisi Periode Awal*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Damono, S.D. dkk. (Ed). (2005). *Nona Koelit Koetjing: Antologi Cerita Pendek Periode Awal (1870-an - 1910-an)*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Faisal, S. (2007). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Faruk dkk. (2000). *Perlawanan Atas Diskriminasi Rasial Etnik: Konteks Sosial-Ideologis Kritik Sastra Tionghoa Peranakan*. Magelang: Indonesia Tera.
- Gottschalk, L. (1985). *Understanding History: A Primer of Historical Method*. Penerjemah Nugroho Notosusasto. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Hadiluwih, S. (1994). *Studi tentang Masalah Tionghoa di Indonesia (Studi Kasus: di Medan)*. Medan: Dhian Doddy
- Hariyono, P. (1994). *Kultur Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina (Tionghoa)
- Isnaini, H. (2022). Mistik-Romantik Pada Novel Drama Dari Krakatau Karya Kwee Tek Hoay: Representasi Sastra Bencana. *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 9(1). <https://doi.org/10.33541/dia.v9i1.3970>
- Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 285 tahun 1978

- Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2000 mengenai pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa
- Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 tahun 1966
- Kridalaksana, H. (2018). *Masa-Masa Awal Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Kumpulan Keputusan Kongres Bahasa Indonesia I-IX Tahun 1938--2008*. 2011. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Liem, Y. (2000). *Prasangka terhadap Etnis Cina: Sebuah Inti Sari*. Jakarta: Djembatan.
- Marcus, A.S. dan Benedanto, P. (2000). *Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia (Jilid 1)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Merisa, D., & Ahmadi, A. (2020). Eksistensi Perempuan pada Karya Sastra Peranakan Tionghoa dalam Antologi Cerpen Yang Liu Karya Lan Famg: Kajian Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir. *Jurnal Bahasa Mandarin*, 4(2). Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/manadarin/article/view/45183>
- Murtini, W., Prasodjo, A., Siwi P, A. (2019). “Fakta Sejarah dalam Novel-Novel Pandir Kelana”. *Jurnal Sastra Indonesia* 8 (3) (2019). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsi>, diakses 25 Februari 2022, 22:23 WIB
- Pardede, A. dkk. (2002). *Antara Prasangka dan Realita (Telaah Kritis Wacana Anticina di Indonesia)*. Jakarta: Pustaka Inspirasi.
- Poerwanto, H. (2005). *Orang Cina Khek dari Singkawang*. Depok: Komunitas Bambu.
- Pramono, D. (2019). Citra Wanita Pribumi dalam Sastra Melayu Tionghoa. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Seni (Sesanti)*, 348–363. Retrieved from <https://eprosiding.fib-unmul.id/index.php/sesanti/article/view/26>
- Rosidi, A. (1967). *Ihtisar Sejarah Sastra Indonesia*. Bandung: Bina Aksara.
- Rosidi, A. (1964). *Kapankah Kesusastraan Indonesia Lahir*. Jakarta: CV Mas Agung
- Salmon, C. (2010). “Sastra Indonesia Awal: Kontribusi Orang Tionghoa”. Diterjemahkan Ida Sundari Husen dkk. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Santosa, I. (2014). *Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran sejak Nusantara sampai Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- San, S. (2017). “Menguak Kabut Sejarah Sastra Indonesia”. *Makalah*. Seminar Nasional Kritik Sastra ditaja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada 15—16 Agustus 2017.
- Setijowati, A. (2012). Hibriditas Identitas Orang-orang Tionghoa Peranakan dalam Teks dan Praktik Silang Budaya. *LITERASI: Indonesian Journal of Humanities*. 2(1), 1-14.
- Sjamsuddin, H. (2020). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Suaka, I.N. (2022). Reposisi Sastra Melayu Peranakan Tionghoa Era Reformasi. *Webinar HISKI Bali via Zoom Meeting*, Jumat 25 Februari 2022.
- Suryabrata, S. (2018). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryadinata, L. (Ed). (2004). *Chinese Indonesians State Policy, Monoculture and Multiculture*. Singapura: Eastern Universities Press.
- Suryadinata, L. (2002). *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES Indonesia.
- Suyadi. (2008). “Peran Orang Jawa dan Cina dalam Keruangan Kota Medan (Studi Antropologi Sosial dalam Pengembangan dan Penataan Kota Medan)”. *Tesis*. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Teeuw, A. (1994). *Indonesia antara Kelisanan dan Keberaksaraan*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Dasar 1945. <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, diakses 29 Januari 2019 pukul 14.18 WIB

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI <https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/index.php/web/result/6839/detail>, diakses 24 Februari 2022, 16:18 WIB
- Walim. (2019). Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam. *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. 2(1) <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4147>
- Yudiono KS. (2007). *Pengantar Sejarah Sastra Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Yudiono KS. (2009). *Pengkajian Kritik Sastra Indonesia*. Jakarta: Grasindo.